

**AKIBAT HUKUM DIBATALKANNYA AKTA HIBAH
YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Disusun Oleh :
Yozevina Samperura
228100058**

**Dibawah Bimbingan:
Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., MM., M.Hum**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
<i>RINGKESAN</i>	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Tahap Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Alat Pengumpul Data.....	28
6. Analisis Data.....	29
7. Jadwal Penelitian.....	29

8. Lokasi Penelitian.....	30
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA.....

A. Hukum Perdata Pada Umumnya.....	32
1. Pengertian Hukum.....	32
2. Pengertian Akibat Hukum.....	33
3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
4. Pengertian Kepastian Hukum.....	37
5. Pengertian Tanggung Jawab.....	38
B. Konsep Dasar Tentang Hibah dalam Hukum Perdata.....	41
1. Pengertian Hibah.....	41
2. Syarat Dan Unsur Hibah.....	44
3. Ciri-Ciri Dan Akibat Hukum Dari Hibah.....	48
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	49
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah..	49
2. Tugas Dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	51
3. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	55
4. Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	60
D. Pembatalan Perjanjian dan Akta Menurut Hukum Perdata.....	66
1. Pengertian Pembatalan.....	66
2. Alasan-Alasan Pembatalan Akta Hibah.....	74
3. Akibat Hukum Pembatalan.....	78

BAB III HASIL PENELITIAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS.....	82
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DARI KEDUDUKAN HUKUM AKTA HIBAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP DIBATALKANNYA AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS.....	102
A. Kedudukan Hukum Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris.....	102
B. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Dibatalkannya Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris.....	112
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Akta hibah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah manakala terjadi perbuatan hukum di mana pihak pertama memberi sesuatu hak atas tanah kepada pihak kedua. Akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleh mengandung cacat hukum, apabila cacat yuridisnya mengenai syarat formil maka akta hibah dapat dibatalkan dan apabila cacat yuridisnya mengenai syarat materil maka akta hibah batal demi hukum. Tentunya dengan batalnya akta hibah menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak maupun terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, apabila batalnya akta hibah karena kesalahan atau kelalaian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap dibatalkannya akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris.

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan meliputi tahap penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipandang relevan dan memadai untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan adanya wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris bahwa akta hibah tanah tidak disyaratkan harus memiliki persetujuan dari pihak lain atau ahli warisnya, kedudukan akta hibah tanah yang dibuat tanpa adanya persetujuan ahli waris adalah sah, benar dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat bagi pemberi dan penerima hibah. Kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah sebab persetujuan ahli waris bukan hal yang disyaratkan. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap dibatalkannya akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris, apabila akta hibah tanah dibatalkan dengan alasan bahwa dalam pembuatan aktanya terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, jika perbuatan membuat akta hibah merupakan perbuatan melawan hukum maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian, jika perbuatan dalam membuat akta hibah memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan tanda tangan, memberikan keterangan palsu atau tindakan pidana yang diatur dalam KUHP maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diberikan sanksi pidana, diberikan sanksi kode etik berupa penjatuhan *schorsing* (pemecatan sementara) atau *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kata Kunci: Akta hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Persetujuan ahli waris, akibat hukum.

ABSTRACT

The deed of donation is made by the Pejabat Pembuat Akta Tanah when a legal act occurs in which the first party grants a right over land to the second party. The deed of donation made by the Pejabat Pembuat Akta Tanah must not contain legal defects; if the legal defect pertains to formal requirements, the deed of donation can be annulled, and if the legal defect pertains to material requirements, the deed of donation is null and void by law. Certainly, the nullification of the deed of donation has legal consequences for both parties and for the Pejabat Pembuat Akta Tanah. If the annulment of the deed of donation is due to the error or negligence of the Pejabat Pembuat Akta Tanah, then the aggrieved party may claim redress through administrative, civil, or criminal means. This study identifies the legal standing of the deed of donation created by the Pejabat Pembuat Akta Tanah without the consent of the heirs, as well as the accountability of the Pejabat Pembuat Akta Tanah for the annulment of the deed of donation made without the consent of the heirs.

The specification of this research is descriptive-analytical with a normative juridical approach method. This research is conducted in 2 (two) stages, including a literature study phase which involves collecting secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and also includes a field research phase. The data collection techniques deemed relevant and adequate for obtaining secondary data in this research are carried out by studying documents to obtain data or information related to the issues being investigated and conducting interviews. The data analysis used is qualitative juridical.

The results of this study explain that the legal status of a grant deed created by the Land Deed Official without the approval of the heirs indicates that a land grant deed is not required to obtain approval from other parties or the heirs. The legal position of a land grant deed made without the consent of the heirs is valid, correct, has full evidentiary power, and is binding for both the grantor and the grantee. The legal standing of a grant deed made by the Land Deed Official without the approval of the heirs cannot be annulled by the heirs of the grantor because the consent of the heirs is not a required condition. Liability of the Land Deed Official for the cancellation of a grant deed made without the consent of the heirs: if a land grant deed is annulled on the grounds that there were errors or negligence in the preparation of the deed, and if the act of creating the grant deed constitutes an unlawful act, the Land Deed Official must compensate the party that suffered the loss. If the act of creating a grant deed meets the elements of a criminal offense, such as forgery of a signature, providing false information, or criminal acts regulated in the Penal Code, the Land Deed Official may be subjected to criminal sanctions, ethical sanctions such as suspension or dismissal from membership of the Association of Land Deed Officials.

Keywords: Deed of gift, Pejabat Pembuat Akta Tanah, heirs' approval, legal consequences.

RINGKESAN

Akta hibah dijieun ku Pejabat Pembuat Akta Tanah nalika aya kajadian hukum di mana pihak kahiji masihan hak kana tanah ka pihak kadua. Akta hibah anu dijieun ku Pejabat Pembuat Akta Tanah teu meunang ngandung cacad hukum, lamun cacad yuridisna ngeunaan syarat formal, mangka akta hibah tiasa dibatalkeun, sarta lamun cacad yuridisna ngeunaan syarat material, mangka akta hibah batal demi hukum. Tangtosna, kalawan batalna akta hibah nyababkeun akibat hukum boh pikeun pihak boh pikeun Pejabat Pembuat Akta Tanah, lamun batalna akta hibah alatan kasalahan atawa kalalaian ti Pejabat Pembuat Akta Tanah, mangka pihak anu dirugikeun tiasa nuntut boh sacara administrasi, perdata, atanapi pidana. Panalungtikan ieu ngaidentifikasi kumaha kedudukan hukum akta hibah anu dijieun ku Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris sareng kumaha pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah kana dibatalkeunna akta hibah anu dijieun tanpa persetujuan ahli waris.

Spesifikasi Panalungtikan ieu ngarupakeun analisis deskriptif kalayan pendekatan yuridis normatif. Tahap panalungtikan ieu dilaksanakeun kalayan 2 (dua) tahap, nyaéta tahap panalungtikan pustaka nyaéta ngumpulkeun data sekunder anu ngawengku bahan hukum primer, sekunder, sarta tersier sarta nganalisis tahap panalungtikan lapangan. Téknik ngumpulkeun data anu dianggap relevan sareng cukup pikeun meunangkeun data sekunder dina panalungtikan ieu dilakukeun ku cara diajar dokumen pikeun meunangkeun data atanapi informasi anu patali sareng masalah anu ditalungtik sarta ngalaksanakeun wawancara. Analisis data anu dipaké nyaéta yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan ieu nerangkeun yén ayana hukum akta hibah anu dijieun ku Pejabat Panyieun Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris yén akta hibah tanah henteu diperlukeun kudu gaduh persetujuan ti pihak séjén atawa ahli warisna, ayana akta hibah tanah anu dijieun tanpa persetujuan ahli waris téh sah, leres jeung miboga kakuatan bukti anu sampurna sarta ngiket pikeun nu masihan jeung nu narima hibah. Ayana hukum akta hibah anu dijieun ku Pejabat Panyieun Akta Tanah tanpa persetujuan ahli waris teu bisa dibatalkeun ku ahli waris masihan hibah sabab persetujuan ahli waris lain hal anu diperlukeun. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kana dibatalkeunana akta hibah anu didamel tanpa idin ahli waris, lamun akta hibah tanah dibatalkeun ku alesan yén dina nyieun aktana aya kasalahan atawa kalalaian, lamun nyieun akta hibah mangrupa lampah ngalawan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah kudu mayar ganti rugi ka pihak anu ngarugikeun, lamun lampah dina nyieun akta hibah nyumponan unsur tindak pidana, sapertos pamalsuan tanda tangan, mikeun katerangan palsu atawa lampah pidana anu diatur dina KUHP, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah tiasa dibéré sanksi pidana, dibéré sanksi kode etik saperti panjatuhan schorsing (pecat samentara) atawa onzetting (pecat) tina kaanggotaan asosiasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kecap konci: Akta hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Persetujuan ahli waris,
akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020.
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko & Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2018.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta: Rajawali, 1990.

- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Reflika Aditama, 2008.
- Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2021.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya: R. A. De. Rozarie, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.
- Notohadimidjojo, O, *Soal-soal Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Raihan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Utomo, *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturann Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

C. Sumber Lain

Awaluddin, "Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum", *Jurnal Academica*, Volume 2, Nomor 1, 2010.

Edwin Yuliska, "Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Normative*, Volume 8, Nomor 1, 2020.

Dian Anggraini Wahyuningrum, Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah", *Notarius*, Volume 17 Nomor 1, Universitas Diponegoro, 2024.

Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance*, Nomor 2, Volume 3, 2018.

Gangsar Prasetyo, "Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia", *Officium Notarium*, Volume 3, Nomor 1, 2023.

Idia Isti Murni, "Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan" *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017.

Nursandi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Menurut Kuh Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2022.

Pupu Sriwulan Sumaya & Maemunah, "Efektifitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 12 Nomor 2, 2017.

Sulistiyo Rini, Arpangi, "Peranan Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, ISSN: 2963-2730, Semarang, 2023.

Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar dan Nanda Anisa Lubis, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 1, Bandung, 2019.

D. Wawancara

Wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nurhayati Samperura, S.H., di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nurhayati Samperura, S.H., di Jalan Sumber Mekar Kav 13-33/9 Komplek Sumber Sari, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222, Senin, 1 September 2025, Pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Erlina Rooskelly Tobing, di Komplek Taman Kopo Indah II Bl II-A/17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 29 September 2025, Pukul 10:30 WIB.